ADVERTORIAL

APBD-P 2025

PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK DAN AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

Kata Pengantar



Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berhasil menyelesaikan penyusunan dan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam format majalah ini.

Publikasi ini merupakan wujud nyata komitmen kami terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Majalah APBD ini dirancang tidak hanya sebagai laporan keuangan semata, tetapi juga sebagai media informasi yang mudah dipahami mengenai prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan target kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam satu tahun anggaran berjalan. Di dalamnya, pembaca dapat menelusuri anggaran pendapatan daerah, belanja daerah yang difokuskan pada program-program kesejahteraan masyarakat (seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), serta pembiayaan daerah.

Penyusunan APBD tahun ini berfokus pada keberlanjutan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kami mengarahkan anggaran untuk mendukung kegiatan strategis, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan pelayanan publik.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tantangan dan potensi perbaikan selalu ada. Oleh karena itu, masukan, saran, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pemangku kepentingan lainnya sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah, DPRD, dan semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan dan penyajian dokumen ini.

Semoga majalah APBD ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Mamuju Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.



Tobadak, 03 November 2025
Bupati Kabupaten Mamuju Tengah

Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 01

Daftar Isi 02

Kondisi Perekonomian 03

Target Pembangunan 04

Fokus Kebijakan Fiskal 2025 05

Postur APBD 06

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah 07

Pendapatan Transfer 08

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 09

BELANJA DAERAH

Belanja Pemerintah Daerah 10

Mandatory Spending 11

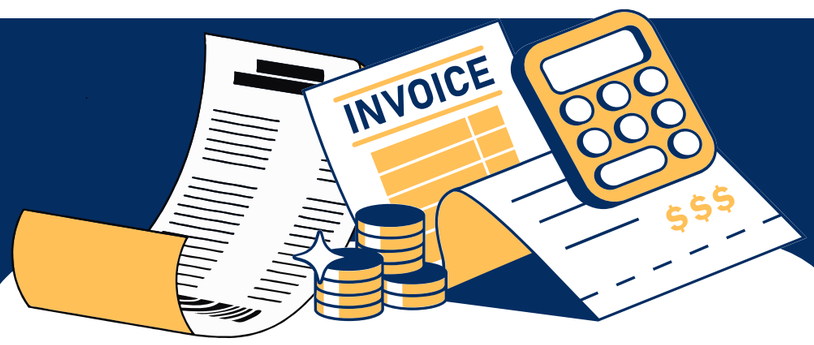
Anggaran Tematik 12

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan 13

Pengeluaran Pembiayaan 13

KONDISI PEREKONOMIAN



SEKTOR UNGGULAN

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian Mamuju Tengah. Aktivitas perkebunan dan agribisnis rakyat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat, sementara sektor jasa, perdagangan, dan konstruksi mulai tumbuh sebagai penopang ekonomi baru.



KETENAGAKERJAAN

Mamuju Tengah termasuk salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terendah di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya 1,7 persen, kondisi ini mencerminkan tersedianya lapangan kerja yang cukup luas, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM.



PENURUNAN KEMISKINAN

Upaya penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil positif. Angka kemiskinan menurun dari 7,72 persen pada 2024 menjadi 7,63 persen pada 2025. Pemerintah daerah terus memperkuat ekonomi masyarakat desa dan memperluas lapangan kerja melalui pemberdayaan UMKM.



PEMERATAAN DAN KESEJAHTERAAN

Rasio Gini berada di angka 0,31, menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 69,05, yang mencerminkan membaiknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

TARGET PEMBANGUNAN

2025



Pertumbuhan Ekonomi (%)

3,63



Tingkat Kemiskinan (%)

7,63



Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

1,7



Ratio Gini

0,31



Indeks Modal Manusia

69,05

FOKUS KEBIJAKAN FISKAL 2025

1.



Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2025 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (substain), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif

2.

Kebijakan belanja pada APBD Kabupaten Mamuju Tengah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2025



3.



Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2025 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pendapatan Daerah

Rp634.152,8 Miliar

Capaian pendapatan tersebut mencerminkan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap mengutamakan kemandirian fiskal, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.



- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** — Rp65,24 M
- **Pendapatan Transfer** — Rp560,57 M
- **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** — Rp8,33 M



Belanja Daerah

Rp644.027,2 Miliar

Alokasi belanja tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- **Belanja Operasi** — Rp467,22 M
- **Belanja Modal** — Rp88,29 M
- **Belanja Tidak Terduga** — Rp 1 M
- **Belanja Transfer** — Rp87,51 M

Pembiayaan Daerah

Rp9.874,3 Miliar

Kebijakan pembiayaan daerah tersebut diarahkan untuk menutup defisit anggaran serta mendukung keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, dengan mengutamakan pengelolaan keuangan yang prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal daerah.

- **Penerimaan Pembiayaan** — Rp13,87 M
- **Pengeluaran Pembiayaan** — Rp 4 M





PENDAPATAN DAERAH



PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 65.241,9 M



Pajak Daerah

Rp. 23.965,0 M

Pendapatan dari pajak daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah daerah, serta efektivitas sistem pemungutan dan pengawasan pajak.

Retribusi Daerah

Rp. 36.898,9 M

Pendapatan dari retribusi daerah dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas layanan publik yang diberikan pemerintah daerah, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, penetapan tarif retribusi yang proporsional dan kompetitif, serta efektivitas mekanisme pemungutan, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah.

Hasil Pengelolaan PAD yg Dipisahkan

Rp. 1.980 M

Dipengaruhi oleh kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), kondisi pasar dan iklim investasi, serta kebijakan dividen dan tata kelola perusahaan daerah. Optimalisasi penerimaan dari pos ini dapat dicapai melalui peningkatan profesionalisme manajemen BUMD, diversifikasi usaha yang produktif, dan penguatan sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik yang bernilai ekonomi.

Lain-lain PAD sah

Rp. 2.397,9 M

Dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola aset dan sumber daya nonpajak, seperti hasil penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, dan penerimaan dari kerja sama pemanfaatan aset.





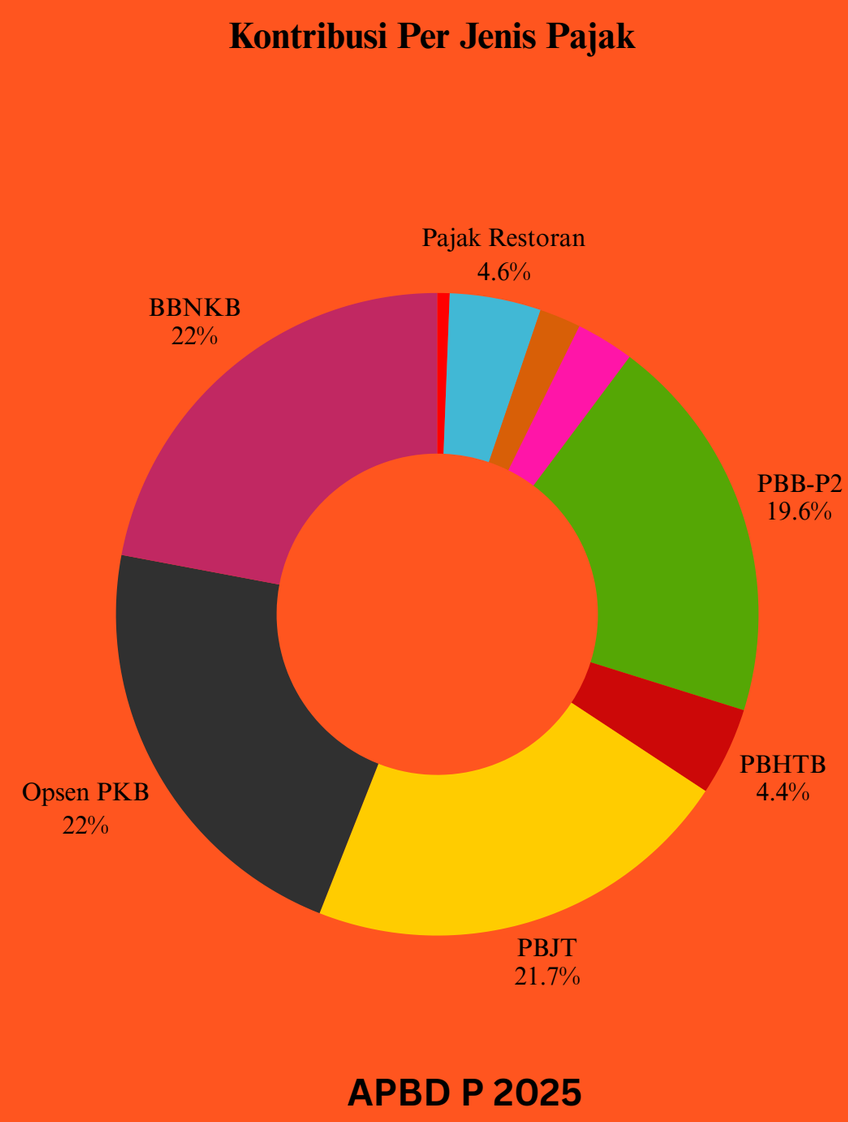
Pajak Daerah

Rp.23.965,0 M

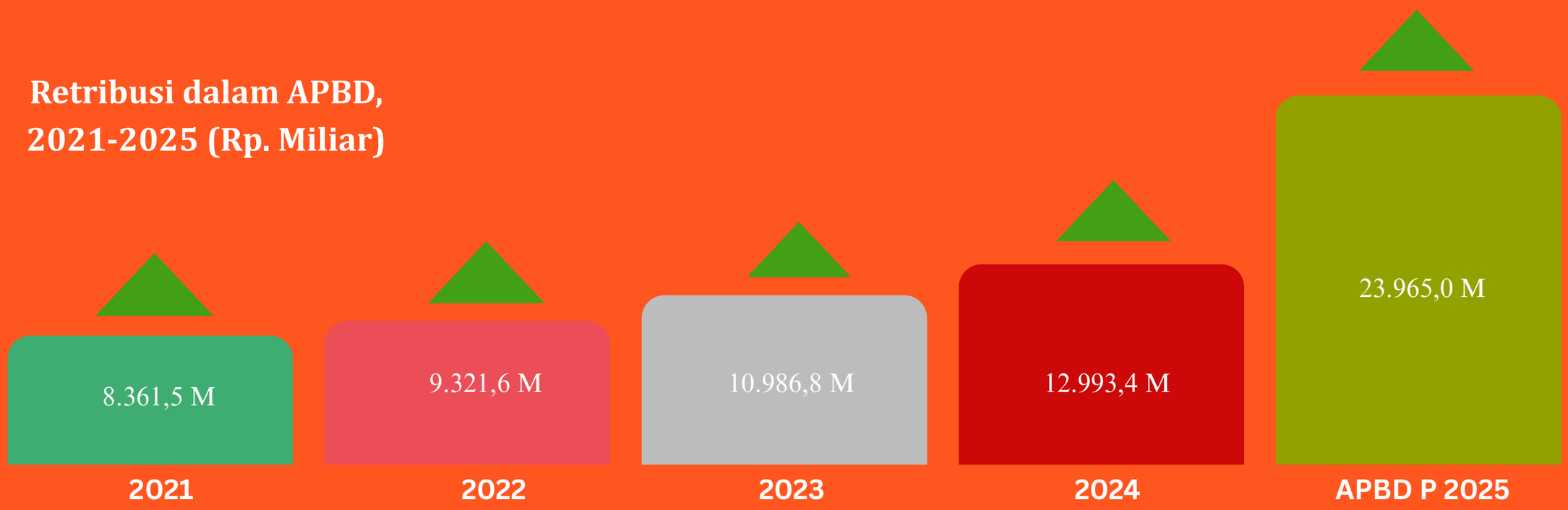
Pendapatan dari pajak daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat kepatuhan wajib pajak, kebijakan pemerintah daerah, serta efektivitas sistem pemungutan dan pengawasan pajak.

Kebijakan Teknis

- Meningkatkan penerimaan pajak daerah secara efisien, akuntabel dan transparan.
- Memperluas basis objek dan wajib pajak agar kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat.
- Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak melalui pelayanan yang baik dan pengawasan yang tepat.
- Mendorong digitalisasi pemungutan pajak untuk mempermudah wajib pajak dan memperkuat kontrol internal.



Retribusi dalam APBD, 2021-2025 (Rp. Miliar)







Pajak Daerah

Pajak Hotel

dipengaruhi oleh tingkat hunian, aktivitas pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.

Pajak Restoran

Dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, jumlah dan aktivitas restoran, serta pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Pajak Reklame

Dipengaruhi oleh jumlah dan jenis reklame yang terpasang, aktivitas ekonomi dan bisnis di daerah, serta kebijakan penataan kota. Semakin banyak kegiatan usaha dan promosi yang menggunakan media reklame, maka potensi penerimaan pajak juga meningkat.

PBB-P2

dipengaruhi oleh jumlah dan nilai tanah maupun bangunan yang menjadi objek pajak, pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

PBJT

dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi masyarakat, perkembangan sektor jasa seperti hiburan, parkir, dan tenaga listrik, serta kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor pajak.

Opsen BBNKB

dipengaruhi oleh jumlah transaksi jual beli kendaraan bermotor, pertumbuhan kepemilikan kendaraan baru, serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama dan membayar pajak.

PBHTB

dipengaruhi oleh jumlah transaksi jual beli tanah dan bangunan, nilai objek transaksi, serta perkembangan sektor properti dan pembangunan daerah.

Opsen PKB

dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan

Pajak MBLB

Dipengaruhi oleh aktivitas penambangan, volume produksi, harga jual hasil galian, serta kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak.



ADVERTORIAL
APBD-P 2025

Retribusi Daerah

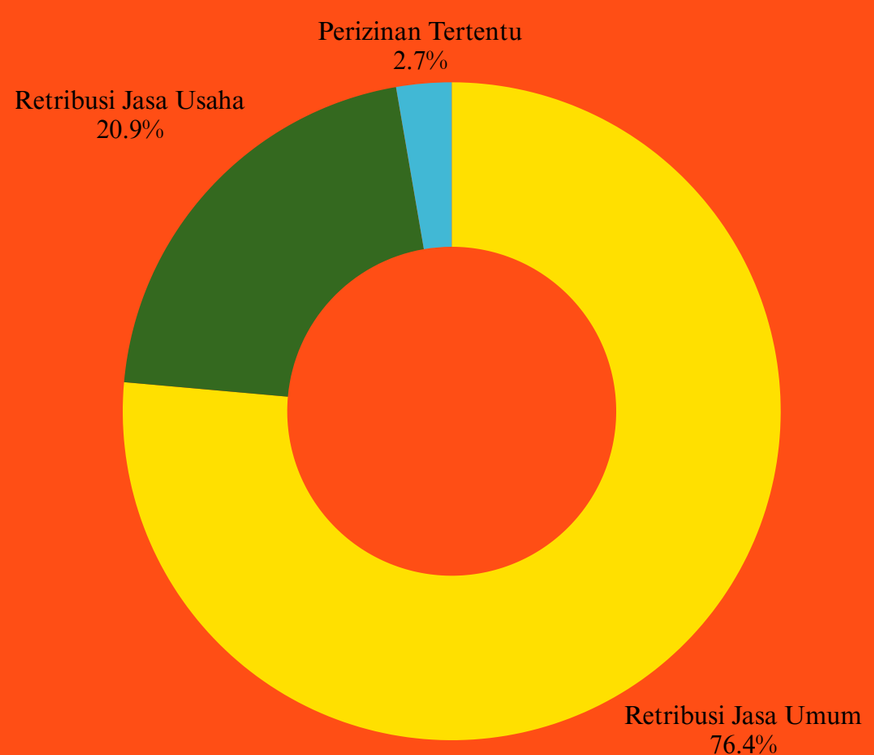
Rp.36.898,9 M

Dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas layanan publik yang diberikan pemerintah daerah, tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan, penetapan tarif retribusi yang proporsional dan kompetitif, serta efektivitas mekanisme pemungutan, pengawasan, dan penegakan peraturan daerah.

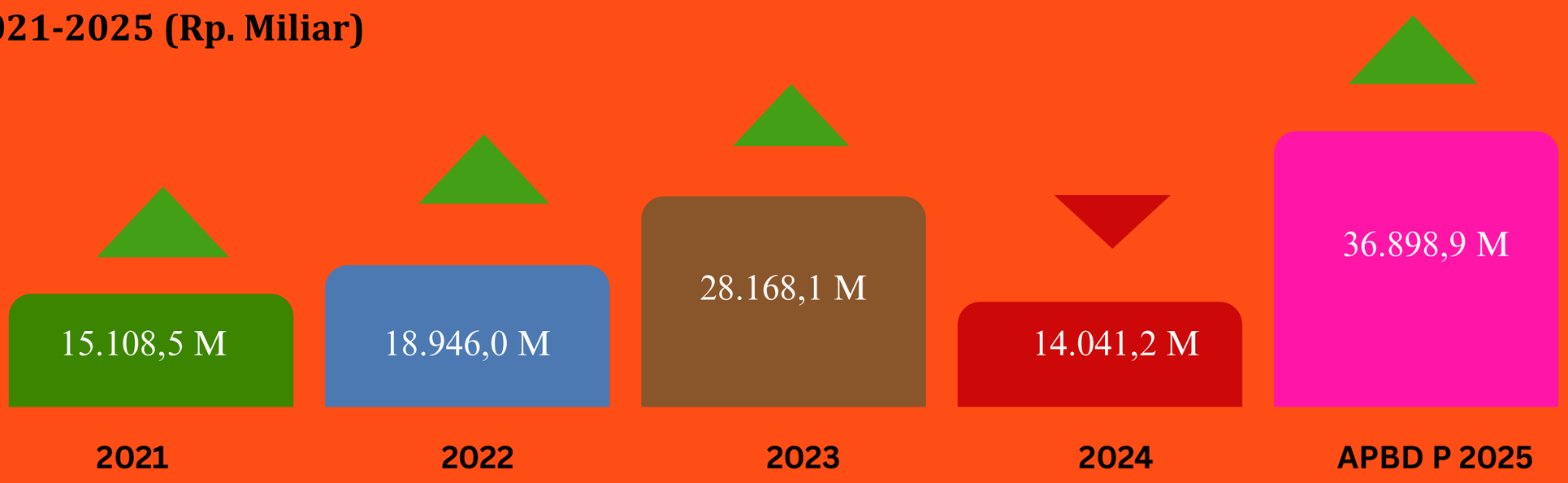
Kebijakan Teknis

- Memberikan kemudahan administratif bagi wajib retribusi yang mendaftar secara online dan membayar tepat waktu.
- Memberikan pembebasan atau pengurangan retribusi untuk objek tertentu sesuai kriteria misalnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam objek seperti izin bangunan gedung.
- Memastikan bahwa fasilitas tersebut tidak mengurangi dasar pengenaan retribusi secara signifikan dan tetap mendukung pendapatan daerah.

Kontribusi Per Jenis Retribusi



Retribusi dalam APBD, 2021-2025 (Rp. Miliar)







Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum

dipengaruhi oleh kualitas layanan publik, kesadaran masyarakat untuk membayar, dan kebijakan tarif yang wajar. Semakin baik pelayanan pemerintah, semakin tinggi keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.





Retribusi Jasa Usaha

dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas fasilitas yang dikelola pemerintah daerah, seperti pasar, terminal, tempat wisata, dan gedung sewa. Semakin baik pengelolaan dan pelayanan fasilitas tersebut, semakin besar minat masyarakat dan pelaku usaha untuk menggunakannya.

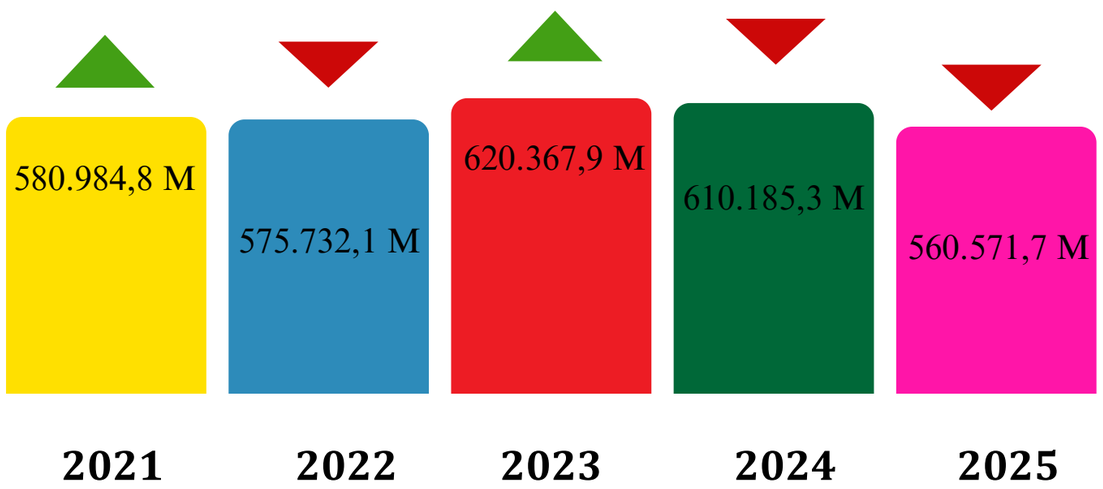
Retribusi Perizinan Tertentu

dipengaruhi oleh jumlah kegiatan usaha dan pembangunan yang memerlukan izin, seperti izin mendirikan bangunan, izin usaha, dan izin pemanfaatan ruang. Semakin banyak investasi dan kegiatan ekonomi, maka potensi penerimaan retribusi juga meningkat.



PENDAPATAN TRANSFER

Rp. 560.571,7 M



Digunakan untuk :

1. Mendukung pelayanan publik Digunakan untuk membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Mengurangi kesenjangan daerah Membantu Desa dengan kemampuan keuangan terbatas agar tetap dapat melaksanakan pembangunan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi – Dialokasikan untuk kegiatan yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjalankan program pemerintah Membiayai pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah.

Transfer Pemerintah Pusat



Dana Desa

Merupakan komponen utama pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini disalurkan melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)



DBH

Terdiri dari

- **DBH Pajak** : DBH PBB, dan DBH PPH Pasal 21
- **DBH Sumber Daya Alam** : DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan, DBH SDA Perikanan, DBH Lainnya, DBH Sawit.



DAU

Terdiri dari

- **DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya :** DAU
- **DAU yang Ditentukan Penggunaannya :** DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum,



DAK

Terdiri dari

- **DAK Fisik :** DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD, Bidang Pendidikan-Reguler-SD, Bidang Jalan, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, Bidang Kesehatan dan KB
- **DAK Non Fisik :** DAK BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dana BOSP

Transfer Antar Daerah

DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan dari DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi dan lingkungan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.





Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Permukaan digunakan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan.

Dana ini merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari pajak provinsi dan dibagikan kepada kabupaten/kota untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan pelayanan publik.

Bagi Hasil Pajak Rokok

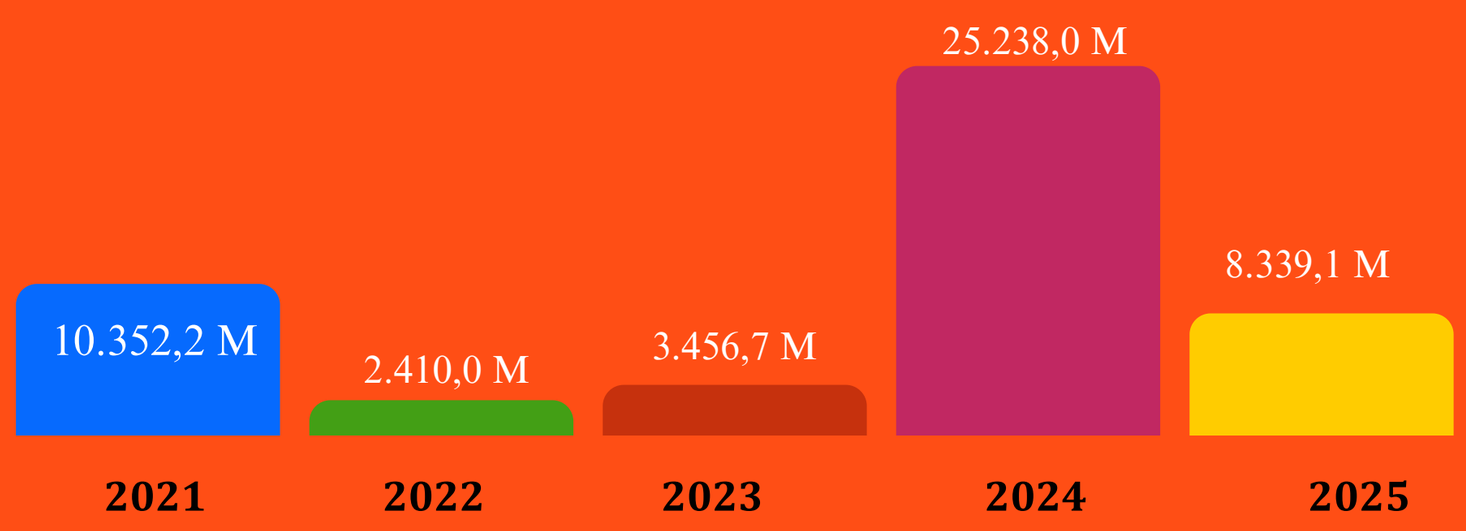
Pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok digunakan untuk mendukung program kesehatan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan.

Dana ini wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 50% untuk mendanai kegiatan pada sektor kesehatan.



LAIN-LAIN PAD SAH

Rp. 8.339,1 M



Digunakan untuk :

Lain-lain PAD yang Sah yaitu Pendapatan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

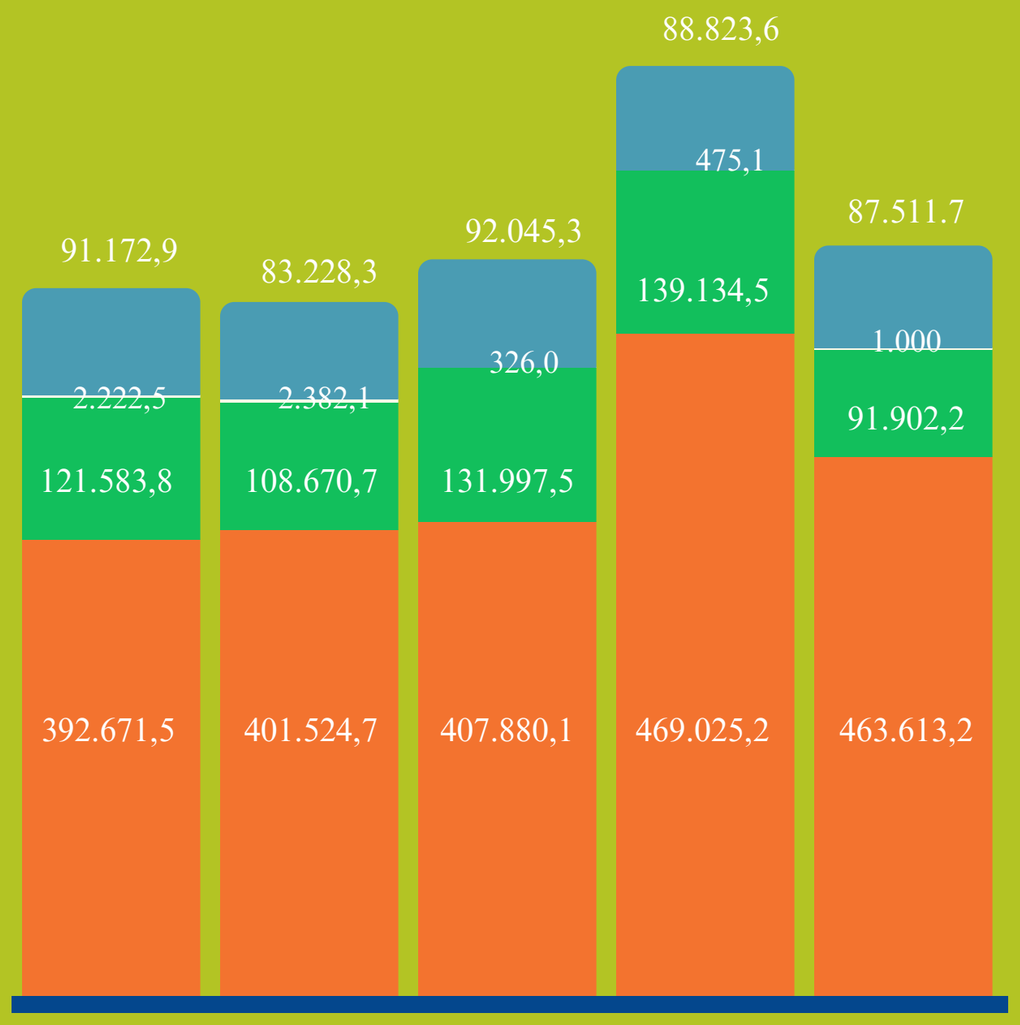




BELANJA DAERAH



BELANJA PEMERINTAH DAERAH





- Belanja Operasional (Rp Miliar)
- Belanja Modal (Rp Miliar)
- Belanja Tdk Terduga (Rp Juta dan Miliar)
- Belanja Transfer (Rp Miliar)

Kebijakan

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
- Memperkuat ketahanan fiskal daerah, melalui pengendalian belanja rutin dan optimalisasi belanja produktif.

- Memperkuat ketahanan fiskal daerah, melalui pengendalian belanja rutin dan optimalisasi belanja produktif.





ANGGARAN MANDATORY SPENDING PENDIDIKAN

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Tantangan Pendidikan Mamuju Tengah

Tingginya angka anak tidak sekolah (ATS).
Masih banyak anak di Mamuju Tengah yang belum bersekolah akibat kondisi ekonomi, jarak sekolah yang jauh, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Kekurangan tenaga pendidik dan ketimpangan sebaran guru.
Sebaran guru belum merata dan jumlahnya masih kurang, terutama di daerah terpencil, sehingga kualitas pembelajaran belum optimal.

Kondisi geografis dan sosial ekonomi yang menantang
Wilayah yang luas dan sebagian sulit dijangkau, ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan.

Sistem informasi pendidikan belum optimal
Pendataan pendidikan masih terbatas dan belum terintegrasi secara digital, sehingga menyulitkan pemantauan dan perencanaan program secara akurat.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
Sebagian besar masyarakat hanya menamatkan pendidikan dasar, dan jumlah lulusan perguruan tinggi masih sangat sedikit.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan
Beberapa sekolah masih kekurangan ruang belajar, fasilitas laboratorium, serta akses internet yang mendukung proses belajar modern.

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan
Melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, serta pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil.



Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan.

Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
Melalui pengembangan kurikulum yang adaptif, penerapan pembelajaran berbasis digital, serta penguatan pendidikan karakter dan budaya literasi.

Pemberian Beasiswa dan Bantuan Pendidikan bagi Siswa Kurang Mampu
Ditujukan untuk mendorong pemerataan kesempatan belajar dan menekan angka putus sekolah melalui program beasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan.

Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan
Difokuskan pada peningkatan efektivitas pengelolaan pendidikan melalui sistem data terpadu, peningkatan transparansi anggaran, serta penguatan koordinasi antar lembaga pendidikan.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN MANDATORY SPENDING PENDIDIKAN





Anggaran Pendidikan 2025 :



Rp. 205.963.772.099,65

31.98 % dari Total Belanja APBD

Target Output Prioritas

Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan Dasar

- Pembangunan 10 ruang kelas baru di sekolah dasar dan menengah.
- Rehabilitasi 20 ruang belajar rusak sedang/berat di SD dan SMP.
- Penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih sekolah di seluruh kecamatan.
- Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 100% dan SMP mencapai 95%.

Pengembangan Infrastruktur dan Transformasi Digital Pendidikan

- Pengadaan perangkat TIK (laptop, proyektor, jaringan internet) untuk 15 sekolah.
- Pembangunan laboratorium komputer di 5 SMP.
- Pengembangan konten digital lokal untuk pembelajaran berbasis karakter dan budaya daerah.

Peningkatan Mutu dan Kompetensi Pendidik

- Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 200 guru SD dan SMP.
- Workshop kurikulum merdeka belajar dan penguatan literasi digital untuk guru PAUD dan SMP.
- Penugasan guru ke daerah terpencil dan perbatasan untuk pemerataan kualitas pendidikan.

Bantuan Pendidikan dan Penghargaan Prestasi

- Pemberian beasiswa berprestasi bagi 100 siswa dari keluarga kurang mampu.
- Bantuan biaya pendidikan bagi 200 peserta didik kesetaraan.
- Penghargaan bagi guru dan sekolah berprestasi tingkat kabupaten.

Penguatan Layanan PAUD dan Pendidikan Nonformal

- Rehabilitasi dan pengadaan 10 unit ruang belajar PAUD.
- Bantuan BOP PAUD reguler dan kinerja bagi seluruh lembaga PAUD di 6 kecamatan.
- Pembinaan 20 lembaga pendidikan kesetaraan (PKBM) dengan target 500 peserta didik.

Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan

- Implementasi sistem data pendidikan daerah (Dapodik daerah) yang terintegrasi.
- Peningkatan transparansi dan efektivitas penggunaan BOS dan BOP.
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Daerah (RIPPD) sebagai arah kebijakan jangka menengah.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR

Meningkatkan Pelayanan Pubik yang merata



Tantangan Infrastruktur Mamuju Tengah

- **Kesenjangan akses layanan dasar** seperti air bersih, sanitasi, dan infrastruktur pendidikan masih cukup tinggi di wilayah pedesaan.
- **Kualitas jalan dan jembatan belum merata,** masih banyak ruas jalan yang membutuhkan rehabilitasi atau rekonstruksi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
- **Pendanaan infrastruktur masih terbatas,** dengan realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik baru mencapai sekitar 33,66% dari total belanja daerah (di bawah ketentuan minimal 40%).
- **Kapasitas pemeliharaan infrastruktur rendah,** ditunjukkan oleh besarnya alokasi untuk rehabilitasi jalan, gedung, dan fasilitas umum yang berulang setiap tahun.
- **Ketimpangan antarwilayah,** terutama antara kawasan pesisir dan pegunungan, menyebabkan pelayanan publik tidak merata.
- **Keterbatasan infrastruktur air minum dan irigasi,** di mana sistem SPAM dan jaringan irigasi masih belum menjangkau seluruh masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur



- **Memperkuat konektivitas wilayah** melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan serta jembatan
- **Penguatan perencanaan dan koordinasi pembangunan** melalui penyusunan dokumen teknis bidang infrastruktur serta monitoring pelaksanaannya di perangkat daerah.
- **Memperluas akses pendidikan dan kesehatan** melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, serta fasilitas kesehatan.
- **Meningkatkan ketahanan sumber daya air dan pertanian** dengan pembangunan tanggul, irigasi permukaan, bendung, dan kanal pengendali banjir.
- **Meningkatkan layanan air minum dan sanitasi,** dengan pembangunan dan pengelolaan SPAM serta sistem pengolahan air limbah (SPALD) setempat.
- **Optimalisasi tata ruang dan lingkungan** untuk mendukung penataan kawasan strategis serta pembangunan gedung yang layak dan aman.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR



Anggaran Infrastruktur 2025

Rp. 187.317.997.235,98

33.66 % Dari Total Belanja APBD

Target Output Prioritas

Bidang Jalan dan Jembatan

- Meningkatnya kualitas dan panjang jalan dalam kondisi mantap.
- Terhubungnya akses antar kecamatan dan desa secara lebih cepat dan aman.
- Terbangunnya jembatan penghubung di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Bidang Air Minum (SPAM)

- Meningkatnya cakupan layanan air bersih bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan.
- Terbangunnya jaringan perpipaan air minum baru untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
- Berfungsinya sistem penyediaan air minum berkelanjutan di wilayah rawan kekeringan.

Bidang Irigasi dan Sumber Daya Air

- Meningkatnya luas lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi.
- Terpeliharanya fungsi bendung, saluran irigasi, dan tanggul sungai secara berkelanjutan.
- Berkurangnya risiko banjir melalui rehabilitasi kanal dan pembangunan tanggul pengaman.

Bidang Kesehatan

- Tersedianya fasilitas kesehatan yang representatif dan mudah dijangkau masyarakat.
- Meningkatnya kapasitas pelayanan puskesmas dan rumah sakit daerah.
- Terpenuhinya sarana penunjang medis dan alat kesehatan untuk meningkatkan mutu layanan.

Bidang Sanitasi dan Drainase

- Tersedianya sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) di kawasan padat penduduk.
- Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan dan pengelolaan limbah rumah tangga.
- Berkurangnya genangan air dan banjir lokal melalui perbaikan dan pembangunan sistem drainase.

Bidang Bangunan Gedung dan Tata Ruang

- Terlaksananya penataan bangunan di kawasan strategis daerah.
- Meningkatnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar laik fungsi dan ramah lingkungan.
- Terwujudnya kawasan perkotaan yang tertata, aman, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Bidang Pendidikan

- Terbangunnya ruang kelas baru di satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Terehabilitasinya gedung sekolah dan fasilitas penunjang pembelajaran.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan merata di seluruh wilayah.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN MANDATORY SPENDING PENGAWASAN

Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pembangunan daerah



Anggaran Pengawasan 2025 :

Rp. 6.763.059.673

1,05 % dari Total Belanja APBD

Arah Kebijakan Pengawasan Daerah

Memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah

- Meningkatkan efektivitas pengendalian internal melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Memastikan seluruh proses pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).



Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

- Pengawasan diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat sasaran.
- Mendorong keterbukaan informasi publik terkait pelaksanaan program dan kegiatan daerah.

Mengoptimalkan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- Penguatan kapasitas SDM dan sistem kerja Inspektorat Daerah untuk melakukan audit berbasis risiko.
- Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat, BPKP, dan perangkat daerah dalam sistem pengawasan terpadu.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN MANDATORY SPENDING BELANJA PEGAWAI

Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas pembangunan daerah



Anggaran Belanja Pegawai 2025 :

Rp. 256.363.833.766

Arah Kebijakan Belanja Pegawai

Berdasarkan regulasi, arah kebijakan mandatory spending belanja pegawai difokuskan untuk:

- **Menjamin pengelolaan fiskal daerah yang sehat dan efisien,**
- **Meningkatkan profesionalisme serta kinerja ASN,**
- **Memastikan kesejahteraan pegawai terpenuhi secara adil dan akuntabel,**
- **Menyelaraskan pengelolaan belanja pegawai dengan prinsip value for money dan batas regulatif**



ANGGARAN SPM KESEHATAN

Meningkatkan Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Berkualitas



Tantangan Kesehatan Mamuju Tengah

Fasilitas kesehatan belum merata
Masih ada Puskesmas dan Pustu yang belum memiliki peralatan lengkap dan tenaga medis yang cukup, terutama di daerah terpencil.

Kekurangan tenaga kesehatan
Sebagian dokter, bidan, dan perawat masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara desa dan pesisir kekurangan tenaga medis.

Kesadaran masyarakat masih rendah
Sebagian masyarakat belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta jarang melakukan pemeriksaan kesehatan rutin.

Penyakit menular dan tidak menular meningkat
Penyakit seperti TBC, ISPA, hipertensi, dan diabetes masih banyak ditemukan karena rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kesehatan.

Keterbatasan anggaran kesehatan
Dana untuk layanan kesehatan masih terbatas, sementara kebutuhan sarana, obat, dan operasional terus meningkat.

Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- Memperluas akses layanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan dasar
- Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
- Mempercepat penurunan stunting dan masalah gizi
- Fokus pada pencegahan penyakit menular (seperti TBC, DBD, dan HIV) serta penyakit tidak menular (seperti hipertensi dan diabetes) melalui deteksi dini dan edukasi hidup sehat.
- Penempatan tenaga medis dan paramedis ke wilayah yang kekurangan, disertai peningkatan kompetensi dan pemberian insentif.



ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN SPM KESEHATAN



Anggaran Kesehatan 2025 :

Rp. 150.814.716.233,13

Target Output Prioritas

- **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**
  Fokus pada terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin sesuai standar, dengan target 3.004 orang.
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
  Menjamin bayi yang baru lahir memperoleh pemeriksaan dan layanan kesehatan sesuai standar, dengan target 2.878 bayi.
- Pelayanan Kesehatan Balita
  Memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi balita agar tumbuh kembangnya optimal. Targetnya 11.981 balita
- Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar
  Diperuntukkan bagi 14.371 anak usia sekolah dasar agar mendapatkan layanan kesehatan rutin seperti pemeriksaan gigi, pengukuran berat badan, dan imunisasi.
- Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
  Bertujuan untuk mendukung kesehatan masyarakat usia kerja melalui pemeriksaan rutin dan edukasi kesehatan.
- Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Lansia)
  Menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin, dan penyuluhan bagi lansia. Targetnya 9.021
- Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus
  Menyasar penduduk dengan penyakit tidak menular untuk pengendalian dan pemantauan rutin. Target hipertensi 24.955 orang dan diabetes 1.836 orang
- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)
  Melaksanakan skrining dan pengobatan bagi pasien TBC untuk menekan penularan penyakit. Target 2.056 orang
- Peningkatan Upaya Promosi dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
  Melalui kegiatan kampanye, edukasi, dan sosialisasi pola hidup sehat di masyarakat dan sekolah.



ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN SPM PUPR

Mendorong Pembangunan dan Pemerataan Sarana Publik yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah



Tantangan Infrastruktur Mamuju Tengah

- Akses infrastruktur belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau.
- Kondisi jalan dan jembatan di beberapa wilayah mengalami kerusakan sehingga menurunkan konektivitas antarwilayah.
- Ketersediaan air bersih, sanitasi, dan drainase masih terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat.
- Anggaran pembangunan infrastruktur masih terbatas sehingga tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi.
- Kapasitas teknis dan jumlah tenaga konstruksi lokal masih rendah, sehingga pelaksanaan proyek belum optimal.
- Pemanfaatan ruang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- Kapasitas teknis dan jumlah tenaga konstruksi lokal masih rendah, sehingga pelaksanaan proyek belum optimal.

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

- Akses infrastruktur belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil yang masih sulit dijangkau.
- Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan lembaga terkait dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga jasa konstruksi lokal agar mampu mendukung pembangunan berkualitas.
- Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur daerah.
- Mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.



- Memperluas pembangunan dan rehabilitasi jembatan guna memperkuat konektivitas wilayah pedesaan dan perkotaan.
- Meningkatkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan drainase untuk mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan yang bersih.
- Mendorong pembangunan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sarana dan prasarana dasar di kawasan perdesaan guna mempercepat pemerataan pembangunan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar pembangunan lebih tertib dan terarah.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN SPM PUPR



Anggaran Infrastruktur 2025 :

Rp. 4.137.670.321,00

Target Output Prioritas

- Program Penyelenggaraan Jalan difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, dengan indikator tingkat kemantapan jalan kabupaten dan target sebesar 57%
- Program Penataan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mengurangi kawasan kumuh, dengan indikator persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang tertangani dan target 100%
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh bertujuan menyediakan hunian layak bagi masyarakat, dengan indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani dan target 100%
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfokus pada peningkatan keselamatan dan efisiensi transportasi, dengan indikator kinerja lalu lintas kabupaten/kota dan target 1.800
- Program Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk menjamin keselamatan kendaraan di jalan, dengan indikator persentase keterpenuhan pengujian berkala kendaraan bermotor dan target 25%
- Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan Kabupaten diarahkan untuk memperlancar arus lalu lintas, dengan indikator persentase keterpenuhan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan target 19% pada tahun 2025
- Program Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur bertujuan memastikan pelaksanaan proyek sesuai standar, dengan indikator jumlah laporan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan jalan kabupaten dan target 12 laporan pada tahun 2025.
- Program Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C diarahkan untuk meningkatkan sarana transportasi publik, dengan indikator jumlah terminal penumpang tipe C yang terbangun dan dilengkapi fasilitas utama serta penunjang dan target 1 unit.

ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran 2025 **Rp. 98.430.586,00**

Kebijakan

- Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- Menanggulangi dan mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh
- Meningkatkan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman
- Mempercepat pemulihan perumahan bagi korban bencana
- Mengembangkan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan permukiman
- Mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman



Output Strategis

Terehabilitasinya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dengan indikator jumlah rumah korban bencana yang terehabilitasi dan target 1 unit rumah pada tahun 2025.

Peningkatan Kualitas Permukiman dan Pencegahan Kawasan Kumuh dengan indikator penurunan luas kawasan kumuh menjadi 0 hektar

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk meningkatkan akses MBR terhadap hunian layak melalui pembangunan rumah baru dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Target 2025 adalah meningkatnya proporsi rumah layak huni hingga 100% dari total MBR penerima manfaat.



Penguatan Tata Kelola dan Perencanaan Kawasan Permukiman, dilaksanakan melalui penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan dokumen rencana kawasan permukiman, guna memastikan setiap pembangunan perumahan sesuai RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Permukiman
Meliputi pembangunan jaringan air bersih, drainase, dan jalan lingkungan pada kawasan perumahan baru dan eksisting, dengan target peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman di seluruh kecamatan.

ANGGARAN SPM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Anggaran 2025 Rp. 5.314.789.493,00

Kebijakan

- Memperkuat sistem deteksi dini dan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
- Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan pengendalian kebakaran daerah
- Memperkuat koordinasi dan respon cepat terhadap bencana
- Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran



Output Strategis

Program Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diarahkan untuk memperkuat keamanan dan ketenteraman wilayah, dengan indikator jumlah laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah dan target sebanyak 13 laporan

Program Kajian Risiko Bencana Daerah dilaksanakan untuk memperkuat dasar perencanaan kebencanaan, dengan indikator jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang sah dan legal

Program Rencana Kontinjensi Daerah diarahkan untuk menyiapkan rencana tindakan dalam menghadapi ancaman bencana, dengan indikator jumlah dokumen rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana yang sah/legal

Program Pengendalian Operasi dan Sarana Kesiapsiagaan Bencana bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), dengan indikator jumlah laporan layanan Pusdalops yang sah dan legal

Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dilaksanakan untuk mempercepat penanganan korban bencana, dengan indikator jumlah korban yang ditemukan, ditolong, dan dievakuasi, serta target sebanyak 50 orang pada tahun 2025.

Program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran difokuskan pada peningkatan respon cepat pemadaman kebakaran, dengan indikator jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan dan pemadaman kebakaran serta target sebanyak 12 laporan



ANGGARAN SPM BIDANG SOSIAL

Anggaran 2025 Rp. 130.426.632,00

Kebijakan

- Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar
- Mempercepat penanganan dan pemulihan korban bencana sosial dan kedaruratan
- Meningkatkan efektivitas penanganan fakir miskin dan kelompok rentan lainnya
- Memperkuat layanan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat. Melalui penguatan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), relawan sosial, dan kader sosial di desa untuk mendukung pelaksanaan SPM bidang sosial.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah sosial.



Output Strategis

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, dengan indikator jumlah korban bencana yang mendapatkan pelayanan permakanan tiga kali sehari, dan target sebanyak 10 orang

- Program Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial bertujuan memperluas jangkauan layanan sosial dasar bagi kelompok rentan, dengan indikator jumlah penerima layanan data, pengaduan, dan penjangkauan sosial, dan target sebanyak 40 orang pada tahun 2025.

- Program Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana diarahkan untuk membantu pemulihan kondisi mental dan sosial masyarakat terdampak bencana, dengan indikator jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial



ANGGARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Anggaran 2025 **Rp. 6.137.514.131,16**

Kebijakan

- **Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin**. Pemerintah daerah fokus memperluas akses pendidikan dasar dan menengah melalui pembangunan serta rehabilitasi ruang kelas, penyediaan sarana-prasarana sekolah, dan bantuan operasional pendidikan agar anak-anak dari keluarga miskin dapat tetap bersekolah.
- **Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.** Dinas Kesehatan diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan ibu, bayi, dan balita guna mencegah kematian dini serta mengurangi beban biaya pengobatan keluarga miskin.
- **Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.** Pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa biaya personal peserta didik, perlengkapan sekolah, serta bantuan operasional pendidikan (BOS dan BOP) agar kebutuhan dasar pendidikan dapat terpenuhi tanpa membebani keluarga miskin.
- **Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.** Melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan sumber daya manusia lokal, terutama di bidang seni, budaya, dan ekonomi produktif, masyarakat miskin diharapkan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri.



Output Strategis

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
Terbangunnya 9 unit sarana dan utilitas sekolah serta 12 ruang kelas baru guna memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari wilayah kantong kemiskinan.

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Menengah.
Terlaksananya rehabilitasi 6 ruang kelas sekolah dasar dan 2 ruang kelas sekolah menengah dalam kondisi rusak berat agar proses belajar dapat berjalan lebih layak dan aman.

Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik
Tersalurkannya bantuan biaya personal bagi 500 siswa SD, 450 siswa SMP, dan 500 peserta didik kesetaraan untuk meringankan beban biaya pendidikan keluarga miskin.

Penyaluran Dana BOS dan BOP Pendidikan Dasar dan PAUD.
Terselenggaranya pengelolaan Dana BOS bagi 153 sekolah dasar dan menengah, serta BOP bagi 122 lembaga PAUD dan 18 lembaga kesetaraan, guna menjamin keberlanjutan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi SDM Kesenian Tradisional
Diberikannya pelatihan keterampilan bagi 7 orang pelaku kesenian tradisional untuk memperluas peluang ekonomi kreatif dan meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.



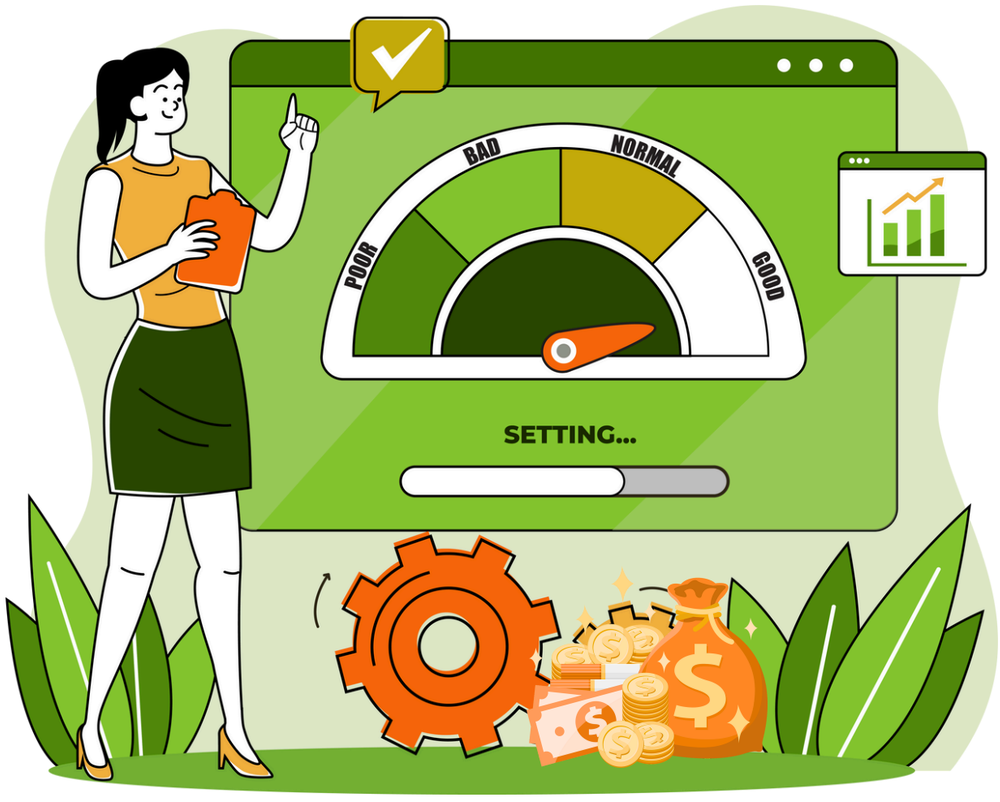
ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN PENGENDALIAN INFLASI

Anggaran 2025 Rp. 17.305.464.318,37

Kebijakan

- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting di daerah
- Meningkatkan ketahanan dan diversifikasi pangan masyarakat
- Memperkuat sistem pemantauan harga dan distribusi barang pokok
- Meningkatkan efisiensi distribusi dan logistik pangan
- Mengendalikan ekspektasi inflasi melalui edukasi dan komunikasi publik



Output Strategis

- Terlaksananya program stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen, melalui kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok sesuai kebutuhan daerah.
- Terwujudnya kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta barang penting di pasar-pasar utama Kabupaten Mamuju Tengah, untuk menjamin ketersediaan barang dan mencegah kelangkaan.
- Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat kecamatan, sebagai dasar kebijakan pengendalian inflasi daerah berbasis data.
- Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan menjaga kestabilan harga.
- Terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah, untuk mendukung stabilitas produksi dan menekan biaya pertanian.



ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN PENURUNAN STUNTING

Anggaran 2025 Rp. 48.869.609.277,82

Kebijakan

- Meningkatkan komitmen dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting.
- Memperluas akses dan kualitas layanan gizi dan kesehatan ibu serta anak.
- Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung intervensi stunting.
- Meningkatkan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola asuh.
- Meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan pemenuhan gizi seimbang.
- Memperkuat sistem data dan pemantauan kasus stunting berbasis digital.



Output Strategis

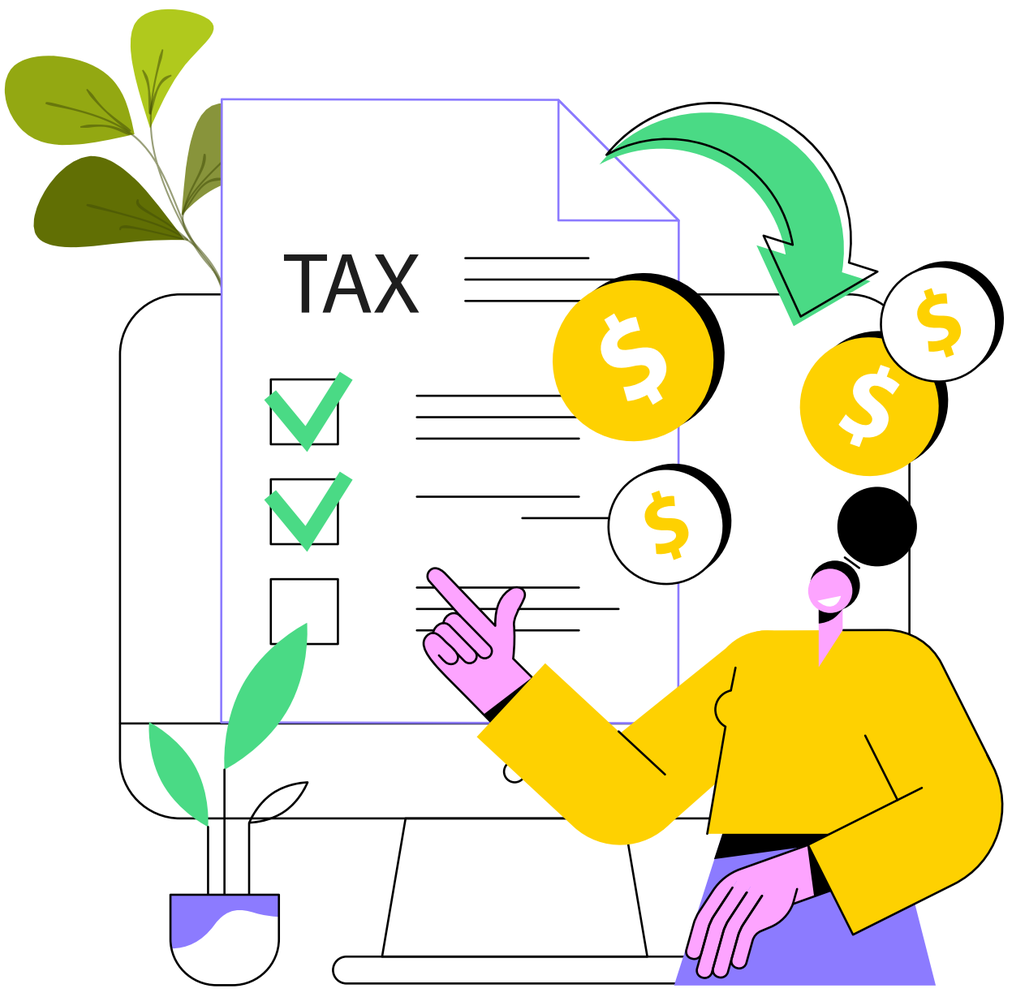
- Menurunnya prevalensi stunting menjadi 13,5% pada tahun 2025 melalui pelaksanaan program konvergensi di seluruh kecamatan dan desa prioritas.
- Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan balita sesuai standar nasional, termasuk kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT), imunisasi dasar, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
- Tersedianya data keluarga berisiko stunting di seluruh desa, yang digunakan untuk perencanaan intervensi gizi dan sanitasi berbasis lokasi.
- Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye gizi seimbang, dengan melibatkan kader posyandu, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan.
- Meningkatnya jumlah desa lokus stunting yang melaksanakan aksi konvergensi secara mandiri, termasuk pengelolaan kegiatan berbasis data dan hasil evaluasi tahunan.
- Terselenggaranya program ketahanan pangan keluarga berbasis sumber daya lokal, untuk memperkuat kemandirian pangan dan gizi di rumah tangga berisiko stunting.



ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN HASIL PENERIMAAN OPSEN PKB

Anggaran 2025 Rp. 2.106.399.232,99



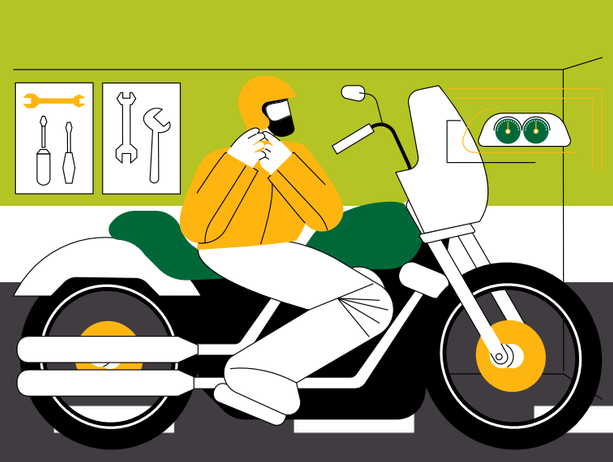
Kebijakan

- Mendukung peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah.
- Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di wilayah kabupaten.
- Mendukung pelayanan publik di bidang transportasi dan mobilitas masyarakat.
- Mendorong pembangunan ekonomi daerah melalui perbaikan aksesibilitas transportasi.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Output Strategis

- Terealisasinya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan kabupaten sepanjang ±15 kilometer
- Tersedianya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, seperti rambu jalan, marka, serta fasilitas penerangan di titik rawan kecelakaan.
- Terlaksananya kegiatan pengujian dan pengawasan kendaraan bermotor secara berkala
- Terlaksananya program sosialisasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor di seluruh kecamatan
- Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor, melalui modernisasi sistem pelayanan dan digitalisasi data wajib pajak daerah.







ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN HASIL PENERIMAAN PBJT

Anggaran 2025 Rp. 520.015.881,00

Kebijakan

- Mendukung peningkatan pelayanan penerangan jalan umum (PJU).
- Meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik untuk kepentingan publik.
- Mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur energi di daerah.
- Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang memanfaatkan tenaga listrik.
- Meningkatkan tata kelola dan transparansi pengelolaan penerimaan pajak daerah.



Output Strategis

- Terlaksananya pemeliharaan dan pemasangan baru Penerangan Jalan Umum (PJU) di 6 kecamatan
- Terealisasinya program efisiensi energi dengan penggantian lampu PJU konvensional menjadi LED hemat energi
- Terbangunnya dan berfungsinya infrastruktur listrik publik di kawasan pelayanan dasar, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.
- Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan energi listrik daerah
- Tersedianya laporan pengelolaan PBJT-TL yang transparan dan akuntabel setiap tahun



ADVERTORIAL
APBD-P 2025

ANGGARAN HASIL PENERIMAAN PAJAK ROKOK

Anggaran 2025 Rp. 5.168.971.250,00

Kebijakan

1. Berdasarkan ketentuan, minimal 50% dari penerimaan pajak rokok digunakan untuk bidang kesehatan. Dari total tersebut: 37,5% dialokasikan untuk pembayaran BPJS Kesehatan masyarakat. 12,5% dialokasikan untuk program kesehatan lainnya di luar BPJS.

2. Fokus Kebijakan :

- Penguatan sistem jaminan kesehatan daerah.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan.
- Pengawasan dan promosi kesehatan masyarakat, termasuk kawasan tanpa rokok.



Output Strategis

- Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
- Menjamin keberlanjutan program JKN-BPJS Kesehatan melalui dukungan pembiayaan daerah.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui intervensi promotif dan preventif. Mengurangi beban penyakit akibat rokok, melalui edukasi dan pengawasan kawasan tanpa rokok.
- Memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, terutama di daerah terpencil.







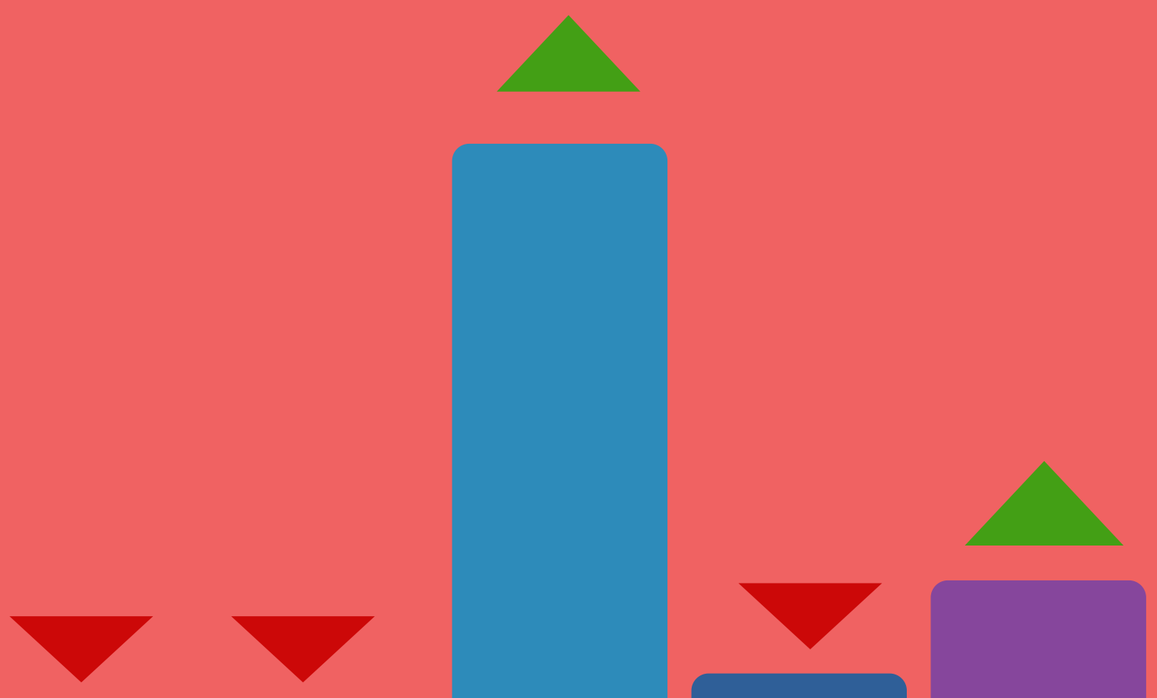
PEMBIAYAAN

DAERAH



PEMBIAYAAN DAERAH

Rp. 9.874,3 M



Kebijakan Pembiayaan a.l.

- Menutup defisit anggaran akibat perbedaan antara pendapatan dan belanja daerah.
- Mengoptimalkan sumber pembiayaan yang sah dan efisien, baik dari SiLPA, pinjaman daerah, maupun penerimaan investasi.
- Mendukung kegiatan prioritas daerah yang bersifat produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas fiskal daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan beban keuangan yang berat di masa mendatang.
- Menjaga kesehatan fiskal daerah, dengan pengendalian defisit dan rasio pinjaman sesuai kemampuan keuangan daerah.

Penerimaan Pembiayaan

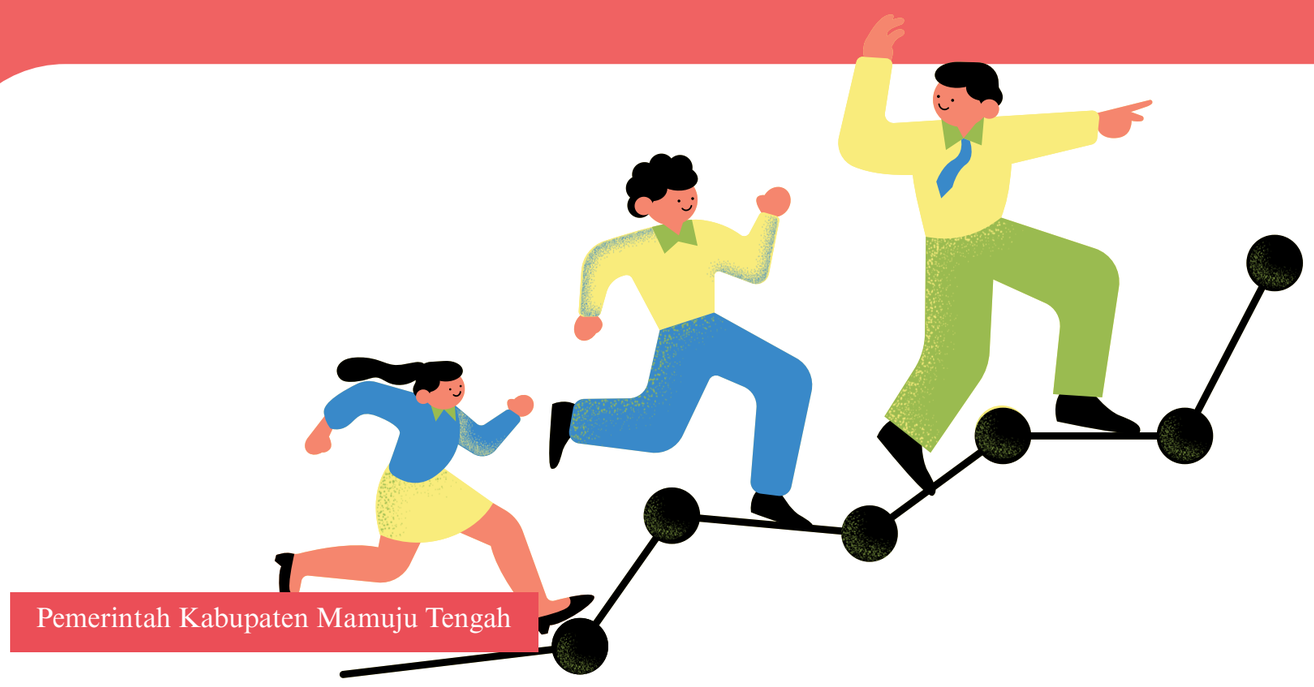
Kebijakan a.l.

- Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber utama penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
- Optimalisasi penerimaan kembali investasi daerah, baik dari hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
- Penggunaan pinjaman daerah secara selektif (jika diperlukan), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi, dan potensi manfaat ekonomi yang dihasilkan.
- Peningkatan efektivitas perencanaan dan penyerapan anggaran, agar tidak terjadi akumulasi SiLPA yang besar dan tetap menjaga keseimbangan fiskal.

Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan a.l.

- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dan lembaga ekonomi daerah, untuk memperkuat permodalan, meningkatkan kinerja usaha, dan memberikan kontribusi terhadap PAD di masa mendatang.
- Pembayaran kewajiban pokok utang daerah secara tepat waktu, dengan tetap menjaga rasio pinjaman dalam batas aman .
- Pemberian pinjaman daerah untuk mendukung pembangunan antar wilayah atau kerja sama daerah yang memberikan manfaat ekonomi bersama.
- Penggunaan pengeluaran pembiayaan secara efisien dan selektif, dengan mengutamakan kegiatan yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
- Penguatan tata kelola investasi daerah, melalui evaluasi kinerja BUMD dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal agar memberikan hasil yang optimal bagi keuangan daerah.





ADVERTORIAL
APBD-P 2025

Pengelolaan Risiko Fiskal

RISIKO	MITIGASI, antara lain :
Penurunan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Risiko ini dapat terjadi akibat perubahan kebijakan nasional atau keterbatasan fiskal pusat. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan aset daerah secara lebih produktif.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan pengelolaan aset daerah, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyaluran dana transfer.
Kenaikan Belanja Akibat Inflasi atau Kebutuhan Mendesak. Kenaikan harga barang dan jasa dapat meningkatkan beban belanja daerah. Mitigasinya dilakukan melalui efisiensi anggaran, pengendalian belanja rutin, dan fokus pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.	Melakukan efisiensi anggaran, memprioritaskan belanja produktif, serta menyesuaikan perencanaan keuangan daerah dengan kondisi ekonomi terkini.
Bencana alam dan keadaan darurat Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan belanja tak terduga serta menurunnya aktivitas ekonomi daerah.	Menyediakan dana cadangan dan anggaran kontinjensi, memperkuat kesiapsiagaan bencana, serta mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Basis pajak dan retribusi daerah yang masih terbatas menyebabkan potensi penerimaan belum optimal. Hal ini meningkatkan risiko ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja.	Meningkatkan sistem pendataan dan pengawasan pajak daerah, mendorong digitalisasi pelayanan pajak, dan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Perubahan kebijakan nasional dan regulasi Perubahan aturan dari pemerintah pusat, seperti penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), dapat memengaruhi besaran pendapatan daerah.	Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran, mengembangkan sumber pendapatan alternatif, dan menjaga komunikasi aktif dengan pemerintah pusat.

ADVERTORIAL

APBD-P 2025

PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK DAN AKSELERASI PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Disusun Oleh :

Nurhaeni

19990203202506200 4

Gelombang 2 Angkatan III Kelompok 1

CPNS Bidang Anggaran, BPKPAD Kab. Mamuju Tengah

Data yang digunakan dalam buku ini :

Peraturan Daerah Perubahan APBD 2025
Peraturan Kepala Daerah Perubahan APBD 2025
LRA 2021-2025
RKPD Perubahan 2025



BIDANG ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

www.keuangan.mamujutengahkab.go.id/